



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**HUBUNGAN BELANJA MODAL
DENGAN BELANJA PEMELIHARAAN
(Studi Empirik Pada Tujuh Kabupaten dan Tiga Kota di Sumatera Barat)**


Oleh :

**ZULKI ANDRE AGUSTA
03 157 051**

Mahasiswa Program Strata Satu (S - 1) Jurusan Akuntansi

*Dajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG
2010**

	No Alumni Universitas	ZULKI ANDRE AGUSTA	No Alumni Fakultas
	<p align="center">BIODATA</p> <p>a). Tempat/Tgl Lahir : Padang / 04 Agustus 1984 b). Nama Orang Tua : Yan Osman, dan Emmy Syarief c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 03157051 f). Tanggal Lulus : 14 Agustus 2010 g). Predikat lulus : Memuaskan h). IPK : 2,70 i). Lama Studi : 6 tahun 11 Bulan j). Alamat Orang Tua : Komp Permata Harbaindo Blok H2 No 14 Pampangan, Lubuk Begalung Padang</p>		

**HUBUNGAN BELANJA MODAL DENGAN BELANJA PEMELIHARAAN
(STUDI EMPIRIK PADA TUJUH KABUPATEN DAN TIGA KOTA DI SUMATERA BARAT)**

Skripsi S-1 Oleh : **Zulki Andre Agusta**

Pembimbing : **Dra. Husna Roza, Mcom Hons, Ak**

Abstrak

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasional dan pemeliharaan. Sehingga proporsi belanja modal yang besar akan mengakibatkan anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya akan naik. Belanja pemeliharaan tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat dan tidak memberikan manfaat ekonomik di masa yang akan datang.

Permasalahannya adalah bagaimana hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan di kabupaten/kota di Sumatera Barat selama tiga tahun (2006-2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan dapat membuktikan hubungan yang signifikan antara belanja modal dan belanja barang terhadap belanja pemeliharaan, dengan kata lain menerima hipotesis nol (H_0) dan menolak hipotesis alternatif (H_a).

Keyword: Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Agustus 2010, dengan penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	A. Rizal Putra, M.Si, Ak	Dra. Nini Syofriyeni, M.si, Ak

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi :

DR. H. Yuskar, SE, MA, Ak
NIP. 196009111986031001

_____ TandaTangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan :
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa perubahan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang *Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat*. Kebijakan ini merupakan tantangan bagi Pemda untuk mengelola keuangannya sendiri secara lebih efektif dan efisien dan memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Misi utama undang-undang tersebut adalah desentralisasi. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi (*Mardiasmo, 2002*). Secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan diseluruh daerah dengan, memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (*Shah, 1997*)

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan

dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (*Halim, 2001*). Untuk itu pemerintah daerah harus memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik, pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal.

Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Di sisi lain dalam Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah masih dalam Gambaran Umum Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien dalam Permendagri No. 13/2006 adalah: efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Besar kecilnya belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berlakunya ketentuan atau kebijakan yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa perubahan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan bagi Pemda untuk mengelola keuangannya sendiri secara lebih efektif dan efisien dan memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Untuk itu pemerintah daerah berupaya melaksanakan pembangunan daerahnya dengan memaksimalkan potensi yang ada dan didasarkan pada anggaran yang ada. Terutama dalam mengatur dan mengelola belanja modal, belanja barang dan belanja pemeliharaan.

Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel independen yaitu belanja modal terhadap variabel dependen yaitu belanja pemeliharaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa APBD pemerintah Kota/ Kabupaten di Sumatera Barat selama 3 (tiga) tahun mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Data diolah dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS. Penelitian ini diuji dengan menggunakan uji regresi linear dan korelasi ,

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, 2007. *Rekonstruksi Anggaran Belanja Pembangunan Kabupaten Pontianak Dalam Suatu Model Akuntansi Baya Sektor Publik*. http://www.skripsi-tesis.com/rekonstruksi-anggaran-belanja_pembangunan-kabupaten-pontianak-dalam-suatu-model-akuntansi-biaya-sektor-publik/ diakses 2 Februari 2010
- Bunari. 2004. *Perbandingan Efisiensi Biaya Pemeliharaan Kendaraan antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Pemerintah Kabupaten Agam*. Universitas andalas.
- Departemen Dalam Negeri republik indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29/2002 *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta, 2002.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta, 2006
- Halim, Abdul. 2000. "Anggaran Daerah dan "Fiskal Stree" (sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di Indonesia)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16 (4): 346-357
- Hariato, David dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita*. Simposium nasional akuntansi X.
- Kasit Bambang Prakosa, 2004. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)". *JAAI Volume 8 No. 2*
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. *Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*. Jakarta, 2006
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi yogyakarta
- .Priyo Hari Adi.2006 "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah" (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
- Supranto, j. 1993. *Statistic Teori Dan Aplikasi*. Penerbit Erlangga.
- Syaiful. 2005. "Pengertian dan perlakuan akuntansi Belanja barang dan belanja modal Dalam kaidah akuntansi Pemerintahan". <http://aset.pu.go.id/belanja.pdf> diakses 5 Januari 2010
- UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah